



THE **Green**
Guarantee
COMPANY

**Lampiran 6 | Lampiran
mengenai Kerangka Kerja
Lingkungan dan Sosial
(Masyarakat Adat dan Lahan)**

September 2022

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan	4
1.1	Latar Belakang Green Guarantee Company	4
1.2	Latar belakang kerangka kerja	4
1.3	Tujuan Dokumen.....	5
1.4	Definisi Istilah Kunci.....	5
2	Dampak negatif dan positif bagi masyarakat adat	7
3	Lingkup, Tujuan dan Prinsip	10
3.1	Lingkup aplikasi	10
3.2	Tujuan Kerangka Kerja	10
3.3	Tujuan kerangka kerja	10
3.4	Tujuan Khusus	10
3.5	Prinsip Umum	11
3.6	Peran dan Tanggung Jawab.....	12
4	Aplikasi Kerangka Kerja.....	13
4.1	Proses Seleksi Transaksi GGC (TSP).....	13
4.1.1	Tahap 1: Originasi Transaksi (1-2 minggu)	14
4.1.2	Tahap 2: Seleksi Awal & Pengelompokkan (1-3 minggu)	15
4.1.3	Tahap 3: Peninjauan Kembali dan Pengajuan Keberatan (1-3 minggu)	16
4.1.4	Tahap 4: Uji Kelayakan (2-5 minggu)	16
4.1.5	Tahap 5: Remediasi & Pemaparan (2-5 minggu)	18
4.1.6	Tahap 6: Strategi Pengawasan dan Evaluasi (2-5 minggu)	19
4.1.7	Tahap 7: Persetujuan (1-2 minggu)	20
4.1.8	Garis Pertahanan Multidisiplin	20
4.1.9	Proyeksi Kerangka Watu TSP	21
4.2	Pasca-penerbitan dari obligasi atau pinjaman iklim hijau.....	21
5	Mekanisme Penanganan Keluhan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	23
5.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	23
5.2	Mekanisme Penanganan Keluhan	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Periksa RAG.....	15
Tabel 2 Contoh Daftar Periksa Untuk Uji Kelayakan.....	17
Tabel 3 Spesialis.....	20
Tabel 4 Daftar periksa untuk pemantauan dan evaluasi	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dampak negatif dan positif.....	7
Gambar 2 Proses Transaksi	13
Gambar 3 Alur Proses.....	14
Gambar 4 Proses Transaksi	14
Gambar 5 Mekanisme Keterlibatan dan Pengaduan Pemangku Kepentingan	26

Pernyataan Resmi

Dokumen berikut ini dilampirkan sesuai dengan pengajuan Proposal Pembiayaan Penuh oleh Green Guarantee Company kepada Green Climate Fund sejalan dengan pengajuan mereka atas Permohonan Fasilitas Persiapan Proyek (FPP) tertanggal 13 Oktober 2021. Tim yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Development Guarantee Company
- Green Guarantee Company
- Pegasys Limited
- IBIS Consulting
- SR Consulting

Kontribusi dari masing-masing organisasi beserta konsultan independen sangatlah berperan penting. Meskipun kami tidak dapat secara khusus memperkenalkan individu-individu yang disebutkan di bawah ini untuk keahlian, dedikasi, energi, dan kedermawanan mereka, peran mereka dalam penyusunan lampiran ini akan telah dicatat dengan baik. Dampak dari Lampiran ini akan menjadi produk dari kontribusi kolektif mereka.

1 Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG GREEN GUARANTEE COMPANY

Green Guarantee Company (GGC) adalah penjamin untuk obligasi dan pinjaman hijau serta iklim. Misi GGC adalah membantu negara-negara berkembang mendapatkan akses ke modal global untuk pembiayaan iklim dengan mentransfer peringkat tingkat investasinya melalui jaminan kepada peminjam negara berkembang. Jaminan atas obligasi atau pinjaman menghilangkan risiko gagal bayar atas pembayaran bunga dan pokok dengan memiliki GGC sebagai pembayar cadangan, jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Jaminan yang diberikan oleh GGC akan membantu kredit dalam meningkatkan proyek perubahan iklim di negara berkembang, meningkatkan peringkat kredit sub-investasi mereka menjadi peringkat investasi sehingga memenuhi syarat bagi investor dari pasar modal global mempertimbangkannya untuk investasi.

Produk dan instrumen keuangan hijau akan memainkan peran utama di semua sektor mitigasi iklim dan adaptasi iklim. Ini termasuk obligasi hijau dan pinjaman hijau yang mengalokasikan penggunaan hasil untuk investasi iklim yang memenuhi syarat.

Jaminan GGC akan meningkatkan kredit obligasi dan pinjaman untuk memungkinkan pasar modal global berinvestasi dalam obligasi dan pinjaman hijau serta iklim dari negara berkembang - memprioritaskan jalur dikarbonisasi dan rendah karbon di pasar negara berkembang. Tujuan GGC adalah menggunakan jaminan untuk memberikan proyek mitigasi iklim yang membantu mewujudkan ekonomi karbon nol bersih dan proyek adaptasi iklim yang menghasilkan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Membantu membangun kembali ekonomi pasar berkembang hari ini untuk penghijauan di masa mendatang akan membantu mencegah krisis ekonomi dan finansial akibat iklim, melindungi pemulihan investasi hari ini, dan menciptakan keuntungan ekonomi jangka panjang. Studi terbaru oleh IFC (2021) menunjukkan bahwa upaya pemulihan hijau di 21 ekonomi pasar berkembang utama (yang mewakili 62 persen dari populasi dunia dan 48 persen emisi global) di sektor-sektor tertentu dapat menghasilkan kesempatan investasi sebesar \$10.2 triliun, menciptakan 213 juta lapangan pekerjaan langsung dan mengurangi emisi GHG sebesar 4 miliar ton CO₂e setiap tahun antara 2020-2030. Portofolio GGC mencakup 11 negara di antaranya dan juga 8 negara lain.

Selain mempertimbangkan dampak positif yang diasosiasikan dengan bantuan keuangan yang telah disediakan, GGC juga mengakui peran penting dari pengelolaan lingkungan dan sosial (L&S) yang sehat untuk mencegah dan/atau meminimalkan potensi liabilitas finansial dan reputasional. Jadi, pertimbangan tentang faktor-faktor L&S dan tindakan pengamanannya merupakan bagian integral dalam pengambilan keputusan dan proses transaksional GGC untuk memastikan bahwa risiko utama dan dampaknya dapat dikelola secara efektif selama siklus transaksi.

1.2 LATAR BELAKANG KERANGKA KERJA

Komitmen Agenda 2030 untuk “Leave no one behind” membawa fokus baru untuk menyertakan dan menjamin prioritas dari masyarakat adat. Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada September 2007. Masyarakat adat memiliki kontribusi penting dalam isu mitigasi dan adaptasi iklim.

Konferensi Para Pihak (COP) ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) telah mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat adat, hal ini telah disertakan dalam perjanjian Cancun (Keputusan 1/CP.16). Dalam

Persetujuan Paris menambahkan bahwa saat berurusan dengan perubahan iklim, pihak-pihak wajib menghormati, mendukung, dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Terlebih lagi, keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam Persetujuan Paris (Keputusan 1/CP.21) mengakui pentingnya menguatkan landasan budaya dan tradisi masyarakat lokal dan adat untuk mewujudkan hal ini. COP meminta pada GCF agar meningkatkan aksi untuk melibatkan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat adat, lokal, dan tradisional selama fase penyesuaian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, perencanaan, dan pelaporan.

Pada umumnya, masyarakat adat cenderung lebih kurang mampu secara sosial, ekonomi, dan hukum, serta tidak bisa memperjuangkan hak, wilayah, lahan, sumber daya alam dan budayanya, mereka bisa juga dibatasi untuk terlibat atau memperoleh manfaat dari pembangunan dan berbagai inisiatif perubahan iklim. Mereka juga mungkin tidak mendapatkan manfaat dari proyek tersebut, ataupun keuntungannya tidak ada atau tidak tersampaikan dengan baik, karena mereka tidak diminta konsultasi mengenai perencanaan atau implementasi proyek-proyek yang mempengaruhi hidup mereka.

Kebijakan lain yang mendukung keterlibatan masyarakat adat dalam GCF, antara lain tindakan pengamanan lingkungan dan sosial (ESS) dan penyusunan standar penatalaksanaan lingkungan dan sosial (EMS). Langkah ini menjunjung tinggi hak masyarakat adat dalam perancangan, implementasi, dan pembiayaan program-program iklim oleh GCF.

Keputusan Dewan GCF (B.15/01) meminta Sekretariat untuk mengembangkan Kebijakan Dana Hibah Masyarakat Adat (IPP). Kebijakan tentang Masyarakat Adat yang dimiliki oleh GCF ini berpegangan pada prinsip-prinsip kebijakan internasional lainnya dan sudah didukung oleh berbagai organisasi masyarakat adat melalui proses-proses konsultasi.

Karena GGC dan organisasi mitranya ingin memperkuat kolaborasi dengan GCF dalam inisiatif mitigasi dan adaptasi iklim yang dibiayai, dokumen kerangka kerja tentang masyarakat adat ini, dengan kerangka-kerangka kerja E&S dan gender, mendukung pengajuan pembiayaan yang diajukan ke GCF.

1.3 TUJUAN DOKUMEN

Dokumen ini akan membantu GGC untuk menggabungkan pertimbangannya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dalam proses kriteria investasinya, sekaligus sambil bekerja menuju tujuan-tujuan dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dokumen ini akan membantu GGC dan yang terpenting, pemilik proyek, untuk dapat mengantisipasi dan menghindari dampak buruk apa pun dari aktivitas-aktivitasnya terhadap hak, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat adat, dan jika hal itu tidak mungkin dihindari agar mereka meminimalkan, memitigasi dan/atau memberi kompensasi yang sesuai dan adil untuk dampak tersebut, secara konsisten dan untuk meningkatkan hasil agar lebih baik seiring waktu.

1.4 DEFINISI ISTILAH UTAMA

Tindakan pengamanan masyarakat adat akan terpicu jika suatu proyek mempengaruhi harga diri, hak asasi, sistem kehidupan, atau budaya Masyarakat Adat secara langsung ataupun tidak langsung, atau jika mempengaruhi wilayah atau sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, dimanfaatkan, ditinggali, atau dinyatakan sebagai aset atau warisan leluhur oleh Masyarakat Adat.

Istilah Masyarakat Adat digunakan secara umum untuk merujuk pada kelompok sosial-budaya yang khas dan rentan, serta memiliki beberapa karakteristik berikut ini:

- i. identifikasi diri sebagai salah satu anggota kelompok adat yang khas dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- ii. memiliki keterikatan kolektif terhadap habitat geografis tertentu atau wilayah leluhur yang terletak di area proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut;
- iii. institusi sosial, ekonomi, budaya, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan
- iv. bahasa daerah, yang sering kali berbeda dengan bahasa resmi di negara atau wilayah tersebut.

Dalam mempertimbangkan karakteristik tersebut, peraturan perundang-undangan nasional, hukum adat, dan setiap konvensi internasional yang diikuti oleh negara tersebut akan dipertimbangkan, mengingat bahwa Kebijakan Masyarakat Adat GCF menyatakan bahwa 'penerapan kebijakan tersebut tidak akan terbatas oleh ketiadaan pengakuan hukum atau identifikasi masyarakat adat oleh suatu negara. Hal tersebut juga tidak akan terbatas oleh status hukum sertifikasi dari tanah, sumber daya, dan wilayah adat'. Secara umum, pemilik proyek akan mempertimbangkan kriteria umum yang telah disetujui dan diterapkan untuk mengidentifikasi masyarakat adat, menghargai identifikasi diri sebagai masyarakat adat atau suku sebagai salah satu kriteria dasar dalam penentuan penerapan dari kerangka kerja ini.

2 Dampak negatif dan positif bagi masyarakat adat

Di bawah ini adalah sebuah table yang berisi dampak negatif dan positif bagi masyarakat adat dan mencakup Langkah-langkah mitigasi tingkat tinggi.

Gambar 1 Dampak negatif dan positif

#	Nature of Borrower	Geography	Sector	GCF Result Area	Project Description (Example)	Alignment with NDC	Typical Risk	Typical Risk for Indigenous People	Mitigant Measure	Positive outcomes
1	Private Sector	Indonesia	Buildings	Mitigation Results Area 3 (Building, cities, industries, appliances)	Bond raised by local financial institution to fund construction of earthquake resistant low income housing projects	Government of Indonesia has made improvement of human settlements and climate resilient infrastructure development a priority in its NDC.	Poor Air and Water Management (quality, consumption & extraction) Extreme weather Habitat and ecosystem destruction Poor labour and working conditions Cultural heritage sites Land acquisition Limited to no Occupational Health and Safety guidelines Noise, dust and pollution	Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures through restriction of access to lands and natural resources No free, prior informed consent is obtained Possible displacement of indigenous peoples, including economic displacement Exclusion of indigenous peoples including through inadequate consultation and free, prior and consent processes Mismanagement of relations prior to and during consultation, failure to tailor consultations to indigenous peoples' styles of consensus-building and group decision-making and paying inadequate attention to land rights and cultural traditions Lack of recognition and protection of indigenous people's land or communities through disjointed and fragmented consultation processes	Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention Emergency Preparedness and Response Plan Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution Respecting national regulations (building safety and prevention of fire and explosion risks) Compliance with national regulations for the protection of historical and cultural property During dry conditions, access roads will be wetted or treated with a biodegradable (e.g. lignin-based) road sealing products to prevent dust generation Stakeholder management plan Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Application of the Indigenous People Framework including participation and consent	Access to affordable and safer housing Reduced number of casualties and injuries during a disaster Lower cost of reconstruction following a disaster Improvements to gender equality through reducing women's greater disaster vulnerability Greater ability of communities to resume work quickly following a disaster Reduced mental health impacts caused by destruction of homes Local job creation More affordable housing can allow remaining capital to be invested in entrepreneurial activities New technical skills, capacity building and technology transfer
2	Sub-National	Laos	Energy	Mitigation Results Area 1 (Energy generation and access)	240 MW floating solar project	Government of Laos is seeking to increase the share of renewable energy (excluding hydro) in its energy mix to 30% by 2025	Poor Air and Water Management (quality, consumption & extraction) Exposure to hazardous materials Poor use of sustainable resources and materials Labour and Working Conditions Occupational Health and Safety	National energy and infrastructures laws may include elements that conflict with laws regarding indigenous peoples' rights Critical ecosystem services are lost, including water for fisheries or to support agriculture	Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in designated storage areas, when not in use. Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Ensure safe disposal of solar panels and battery systems by including provisions in contracts Establishing stakeholder engagement plan for the project Undertaking feasibility assessments prior to undertaking floating solar installation site and technology specific feasibility assessments to ensure it is not situated in areas that have sensitive marine biodiversity documented and well away from protected areas Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention	Access to clean electricity for resilience Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through enabling safe food storage Transition to a low carbon economy Local job creation New technical skills, capacity building and technology transfer Reduction in evaporation and water loss at the project site, promoting water security
3	Private Sector	Indonesia	Energy	Mitigation Results Area 1 (Energy generation and access)	1 GW of integrated solar and energy projects in Batam, Bintan and Karimun regions.	Government of Indonesia is seeking to install circa 22 GW of renewable energy by 2030.	Poor Air and Water Management (quality, consumption & extraction) Hazardous materials Poor use of sustainable resources and materials Poor labour and Working Conditions Limited to no Occupational Health and Safety guidelines Inadequate disposal of batteries Potential to increase pressure on indigenous peoples' lives and livelihoods	Traditional practices / knowledge are sidelined due to new technologies Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from project benefits Lack of recognition and protection of indigenous people's land or communities through disjointed and fragmented consultation processes	Making provisions for the use of PV rather than lead acid batteries Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Stakeholder management plan Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention Compliance with national regulations for the protection of historical and cultural property Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in designated storage areas, when not in use. Communication programme to inform the population of about ongoing works	Access to clean electricity for resilience Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through enabling safe food storage Local job creation New technical skills, capacity building and technology transfer Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land is used
4	Private Sector	Philippines	Energy	Mitigation Results Area 1 (Energy generation and access)	Construction of 110MW of solar plants on Luzon Island	Philippines' National Climate Change Action Plan has renewable energy as a stated priority.	Poor Water Management (quality, consumption & extraction) Exposure to hazardous materials Poor use of sustainable resources and materials Poor labour and Working Conditions Limited to no Occupational Health and Safety guideline	Potential to increase pressure on indigenous peoples' land and livelihoods Traditional practices / knowledge are sidelined due to new technologies National energy and infrastructures laws may include elements that conflict with laws regarding indigenous peoples' rights Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures through restriction of access to lands and natural resources No free, prior informed consent is obtained Possible displacement of indigenous peoples, including economic displacement	Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention Emergency Preparedness and Response Plan Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management Stakeholder management plan Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in designated storage areas, when not in use. Solid Waste Management plan for hazardous materials Communication programme to inform the population of about ongoing works	Access to clean electricity for resilience Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through enabling safe food storage Transition to a low carbon economy Local job creation New technical skills, capacity building and technology transfer Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land is used

#	Nature of Borrower	Geography	Sector	GCF Result Area	Project Description (Example)	Alignment with NDC	Typical Risk	Typical Risk for Indigenous People	Mitigant Measure	Positive outcomes
5	Sub-National	Rwanda	Energy/Buildings	Mitigation Results Area 1 (Energy generation and access), Adaptation Results Area 3 (Infrastructure and built environment)	Green bond/loan raised by a sub-national financial institution to finance a pipeline of small scale distributed renewable energy projects	The Government of Rwanda's Green Growth and Climate Resilience Strategy has sustainable small-scale energy installations in rural areas as a stated priority.	Poor Water Management (quality, consumption & extraction) Hazardous materials No access to sustainable resource and materials Extreme weather Habitat and ecosystem destruction Use of pesticides and agrochemicals Poor labour and Working Conditions Limited to no Occupational Health and Safety guideline Noise, dust and pollution	Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from project benefits Potential to increase pressure on indigenous peoples' land and livelihood National energy and infrastructures laws may include elements that conflict with laws regarding indigenous peoples' rights Traditional practices / knowledge are sidelined due to new technologies	Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Stakeholder management plan Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Protection and conservation of biodiversity at project sites and captured in respective ESIA's, which include measures to avoid, minimize, mitigate or offset any potential impacts to natural habitats and living natural resource Targeted consultation with users and residents in the affected areas Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution Integrate physical climate risks and adaptation into core business processes.	Large and consistent social benefits off-grid solar systems and mini-grids that would replace lighting systems that are either fossil fuel-based such as diesel generators and kerosene lamps or woody biomass, or non-reusable dry-cell batteries Higher electrification rate, which will i) improve ability to study and therefore improve educational opportunities; ii) reduce the workload of women and girls; iii) increase time available for income-generating activities; iv) improve health outcomes, for example through providing electricity to hospitals or through enabling safe food storage Access to solar PV systems No greenhouse gases (GHGs) or air pollutants emitted into the atmosphere during installation and operation of solar PV systems Local job creation New technical skills, capacity building and technology transfer Opportunity to provide a source of income for indigenous peoples if their land is used Transition to a low carbon economy
6	Sub-National	Laos	Transport	Mitigation Results Area 2 (Low emission transport)	Installation of EV charging stations	Government of Laos is seeking to increase the share of electric vehicles (EV) to over 30% of the vehicle population by 2030	Hazardous waste management Emissions, noise, dust and pollution Habitat and ecosystem destruction Sustainable resource and materials Poor labour and Working Conditions Limited to no Occupational Health and Safety guideline Traffic congestion Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from project benefits	Traditional practices / knowledge are sidelined due to new technologies National energy and infrastructures laws may include elements that conflict with laws regarding indigenous peoples' rights Land Acquisition	Road safety management procedure to address potential hazards on communities resulting from construction activities and operationalisation of construction equipment Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in designated storage areas, when not in use. Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Stakeholder management plan Solid Waste Management plan for hazardous materials Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention Establishment of regular control measures of the intensity of noise pollution Traffic management plan	Technological innovation Transition to a low carbon economy Reducing pollutants and CO2 emissions caused by burning fossil fuels Reducing major air pollutants like NOx, SO2, PM2.5, and other pollutants, providing health benefits Demonstratable new business model for mitigating negative environment impacts by applying renewables into the auto industry Reducing reliance on imported fossil fuels, thereby improving energy security Opportunity to reduce the running cost of vehicles, improving the accessibility of transport
7	Private Sector	India	Transport	Mitigation Results Area 2 (Low emission transport)	Construction of more than 100,000 EV charging points for two-wheeler electric vehicles	Government of India has set a national target for 30% of all new vehicle sales to be electric by 2030 (with 80% of 2 wheeler sales expected to be electric by 2030).	Hazardous waste management Emissions, noise, dust and pollution. Habitat and ecosystem destruction Poor use of sustainable resources and materials Land Acquisition Poor labour and Working Conditions Limited to no Occupational Health and Safety guideline Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from project benefits	Traditional practices / knowledge are sidelined due to new technologies	Road safety management procedure to address potential hazards on communities resulting from construction activities and operationalisation of construction equipment Hazardous chemical substances used during construction shall be stored in designated storage areas, when not in use. Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Stakeholder management plan Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention	Technological innovation Transition to a low carbon economy Reducing pollutants and CO2 emissions caused by burning fossil fuels Reducing major air pollutants like NOx, SO2, PM2.5, and other pollutants, providing health benefits Demonstratable new business model for mitigating negative environment impacts by applying renewables into the auto industry Reducing reliance on imported fossil fuels, thereby improving energy security Opportunity to reduce the running cost of vehicles, improving the accessibility of transport
8	Private Sector	Indonesia	Waste Management	Adaptation Results Area 3 (Infrastructure and built environment)	Construction of an Integrated Waste Treatment Facility in Tangerang City in the Greater Jakarta Area. The facility will have the capacity to generate energy from waste as well.	Government of Indonesia has made improvement of human settlements and climate resilient infrastructure development a priority in its NDC.	Land Acquisition/displacement /disturbance Landfills require large areas of land and may have an impact far beyond the actual disposal site Emissions, noise, dust, and pollution Habitat and ecosystem destruction Traditional practices / knowledge are sidelined due to new technologies Poor labour and Working Conditions Limited to no Occupational Health and Safety guideline Recycling processes may be very energy-intensive Access to natural resources Risk Associated with Gender-Based Violence	Negative impacts to traditional sustainable livelihoods and cultures through restriction of access to lands and natural resources Possible displacement of indigenous peoples, including economic displacement Exclusion of indigenous peoples including through inadequate consultation and free, prior and consent processes Lack of recognition and protection of indigenous people's land or communities through disjointed and fragmented consultation processes Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from project benefits National energy and infrastructures laws may include elements that conflict with laws regarding indigenous peoples' rights	Integrate physical climate risks and adaptation into core business processes Complete Method Statement outlining how waste will be managed on site, temporary storage areas, waste types to be recycled, as well as methods of disposal No on-site burying, burning or dumping of waste is allowed Different waste types to be stored separately Contractor to investigate options of "take-back" policies for any materials, packaging, etc., not used on site. Examples could include used pallets, plastic wrapping, etc., prior to recycling materials Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement policy Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures All waste materials generated on site during the construction phase should be collected separately and stored in a suitable, secure location prior to disposal. Contaminated waste metals will require recovery by a suitable waste contractor for decontamination Stakeholder management plan Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Communication programme to inform the population of about ongoing works Application of the Indigenous People Framework including participation and consent	Transition to a low carbon economy Improving access to clean energy, thereby reducing pollution caused by using fossil fuels Reducing reliance on fossil fuel imports, thereby improving energy security Improving recycling and increasing waste collection Reducing plastic pollution, protecting the environment Alleviating pressure on Rawa Kucing landfill site, protecting the water quality of the Cisdane River Anaerobic processes can provide energy benefits from CH4 recovery and use Can destroy pathogens and provide useful soil amendments if properly implemented using source-separated organic waste or collected wastewater Can be aided by NGO efforts, private capital for recycling industries, enforcement of environmental regulations, and urban planning to segregate waste treatment and disposal activities from community life Local job creation New technical skills, capacity building and technology transfer
9	Private Sector	Philippines	Water	Adaptation Results Area 2 (Health, wellbeing, food and water security)	Bulk water supply project in Luzon Island to provide up to 200 million liters per day	Philippines' National Climate Change Action Plan has water sufficiency as a stated priority.	Extreme weather Habitat and ecosystem destruction (fauna and flora) Use of pesticides and agrochemicals Water Management (quality, consumption and extraction) Poor labour and Working Conditions Limited occupational Health and Safety -Heavy machinery may present a health and safety risk to worker Accidents with chlorine gas entail severe risks for health and safety Risk Associated with Gender-Based Violence	Social exclusion and negative impacts to disadvantaged and vulnerable groups, in particular due to potential exclusion from project benefits Traditional practices / knowledge are sidelined due to new technologies	Integrate physical climate risks and adaptation into core business processes. Chlorine gas is stored in containers in a covered area, away from hot sun and other sources of heat Labor management framework and procedures Occupational Health and Safety (OHS) management procedures Stakeholder management plan Chance find procedures for cultural heritage and grievance redress mechanism for addressing public grievances regarding the project Workers' codes of conduct, particularly in relation to GBV/SEA prevention Water quality management procedures Communication programme to inform the population of about ongoing works Hazardous material management and an emergency response plans	Improvement of hygiene conditions and reducing the prevalence of waterborne diseases Enhancement of water supply security. Increasing access to clean water, improving communities' health Improving availability of water for sanitation Improving water supply for agriculture, supporting income generation Reducing the workload of women and men involved in water collection activities, thereby increasing the time available for income-generating activities Decreasing spend on treatment of water-borne diseases, meaning more capital is available for income-generating activities Local job creation Potential to improve water supply to tourism facilities, supporting employment opportunities New technical skills, capacity building and technology transfer Mitigating against the growing insecurity of water supply, caused by climate change

Masyarakat adat termasuk yang merasakan dampak langsung dari perubahan iklim meskipun mereka berkontribusi kecil terhadap emisi gas rumah kaca. Mereka juga secara langsung terkena dampak kerusakan lingkungan, yang merupakan penyebab utama perubahan iklim, seperti penggundulan hutan, degradasi tanah, dan polusi akibat pertambangan dan pengeboran minyak serta gas bumi. Perubahan iklim menimbulkan ancaman besar terhadap mata pencaharian, budaya, identitas, dan cara hidup mereka karena sebagian besar masyarakat adat memiliki ikatan budaya yang kuat dengan lingkungan mereka, serta sangat bergantung pada sumber daya alam dan lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Perubahan iklim juga berisiko memperparah kerentanan sosio-ekonomi mereka. Program ini akan membantu untuk menjamin bahwa dampak-dampak negatif dapat bisa dihindari sementara hasil-hasil yang positif tercapai. Beberapa dari dampak positif dan negatif potensial yang dapat dipengaruhi oleh program GGC termasuk:

Potensi Dampak negatif:

- Dampak Negatif terhadap mata pencaharian dan budaya tradisional yang berkelanjutan melalui pembatasan akses terhadap lahan dan sumber daya alam
- Kemungkinan adanya pemindahan dari masyarakat pribumi, termasuk pemindahan ekonomi
- Pengecualian terhadap masyarakat pribumi termasuk melalui proses konsultasi yang tidak memadai dan bebas, sebelum dan sesudah persetujuan
- Kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap lahan dan komunitas masyarakat adat karena proses konsultasi yang terputus-putus dan terfragmentasi,
- Kerangka Kerja Masyarakat Adat tidak diimplementasikan oleh GGC atau tidak diawasi oleh AE secara efektif.

Potensi Dampak positif:

- Melalui konsultasi, langkah-langkah intervensi dirancang bekerja sama dengan masyarakat adat, yang mencakup langkah-langkah mitigasi yang diarahkan untuk mengurangi emisi akibat penggundulan dan degradasi hutan dengan mendorong konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan meningkatkan stok karbon hutan (seperti, REDD+), serta adaptasi praktik agrikultur terhadap perubahan iklim.
- Membantu masyarakat adat untuk mengakses peluang kerja yang layak dan melakukan langkah-langkah mitigasi serta mendukung usaha-usaha yang berkelanjutan seperti koperasi.
- Indikator dan target yang membantu mendorong kemajuan hak-hak masyarakat adat disertakan ke dalam kartu skor transaksi dan dengan demikian dapat diukur dan dilaporkan sebagai suatu dampak kepada para investor.

3 Lingkup, Tujuan dan Prinsip

3.1 LINGKUP APLIKASI

Kerangka kerja akan diaplikasikan pada seluruh aktivitas yang dijamin GGC. Lebih dari itu, Kerangka kerja ini berlaku kapan pun ada masyarakat adat yang menghuni, atau memiliki ikatan kolektif atau hak terhadap lahan tersebut. Aplikasi ini akan selalu diterapkan terlepas dari apakah masyarakat adat akan terdampak positif ataupun negatif, dan terlepas dari apa pun signifikansi dari dampak tersebut.

Pengecualian

Proyek kategori A dikecualikan dari GGC.

GGC tidak akan mendanai aktivitas yang mengakibatkan pemukiman kembali masyarakat pribumi yang tidak suka rela. GGC akan menghindari kegiatan pendanaan yang mungkin melibatkan pemindahan secara fisik (yaitu relokasi, termasuk relokasi yang dibutuhkan akibat kehilangan tempat tinggal), baik secara penuh atau parsial dan permanen atau sementara, atau pemindahan ekonomi dan pekerjaan (yaitu kehilangan aset atau akses ke aset yang mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian) sebagai akibat dari kegiatan

GGC tidak akan mendanai kegiatan apa pun yang mengakibatkan adanya kontak yang tidak dikehendaki dengan kelompok terpencil yang memiliki kontak eksternal terbatas, dan juga dikenal sebagai masyarakat “dalam isolasi sukarela”, “masyarakat terisolasi”, atau “dalam kontak awal”.

3.2 TUJUAN KERANGKA KERJA

Tujuan GGC adalah untuk membina hubungan yang saling menghormati dan kolaboratif untuk membangun komunitas yang lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan kerangka kerja yang menguntungkan bagi program-program dan generasi mendatang. Prinsip ‘do no harm’ juga merupakan landasan GGC untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang ditimbulkan karena perencanaan ataupun dampak dari penjaminan yang dikeluarkan. Hal ini diterapkan melalui pemahaman yang kuat mengenai konteks tentang dimana GGC bekerja dan dengan menekan para pemilik proyek untuk menggunakan kerangka kerja ini dengan baik selama melaksanakan tahapan implementasi program-programnya.

3.3 TUJUAN KERANGKA KERJA

Tujuan keseluruhan dari Kerangka Kerja ini adalah untuk menciptakan sebuah struktur yang dapat menjamin bahwa GGC dan berbagai aktivitas proyek mitranya dikembangkan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh GCF. Kerangka Kerja ini akan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas iklim dikembangkan dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat mengembangkan rasa hormat, dukungan, dan perlindungan penuh terhadap masyarakat adat agar mereka a) memperoleh manfaat dari berbagai aktivitas dan proyek yang didanai oleh GCF dengan cara yang sesuai dengan budayanya, dan b) tidak mengalami kerugian ataupun dampak negatif akibat perancangan dan implementasi aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh GCF.

3.4 TUJUAN KHUSUS

Tujuan kebijakan khusus mencakup:

1. Bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif apa pun dari proyek yang dibiayai GCF terhadap masyarakat lokal atau kepada lingkungan termasuk hak atas tanah mereka.
2. Menggunakan uji kelayakan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia (“tidak menyakiti”) dan mengatasi dampak negatif hak asasi manusia kepada masyarakat pribumi dan anggota masyarakat yang rentan.
3. Untuk mendukung dan mendukung kesejahteraan, kontribusi positif, dan kepemimpinan masyarakat adat dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi iklim dengan berpegang teguh pada sistem pemahaman dan tradisi mereka, penghidupan, sistem dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan mendukung kesetaraan akses dan hak, kesetaraan gender, dan kesesuaian adat-istiadat.
4. Untuk memungkinkan partisipasi masyarakat adat dalam proses memperoleh dampak dan hasil perubahan iklim yang lebih berkelanjutan selama tahap implementasi program.
5. Pengakuan dan komitmen untuk memperoleh hasil yang nyata dan dapat ditindaklanjuti.
6. Perencanaan dan pengawasan aktivitas dilakukan dengan komunitas adat untuk menjamin akuntabilitas dan tanggung jawab bersama.
7. Memastikan bahwa program-program yang dijamin berkelanjutan dan menghasilkan peningkatan kapasitas dan membangun ketangguhan komunitas.

3.5 PRINSIP UMUM

Prinsip panduan dasar kebijakan ini mencakup:

1. Menghargai dan mendukung hak masyarakat adat atas lahan, wilayah, dan sumber dayanya.
2. Mengakui hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam UNDRIP serta instrumen internasional dan regional lain yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan individu, termasuk, jika dapat diterapkan tapi tak terbatas pada, Konvensi ILO No. 169, Perjanjian Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras.
3. Menghormati hak masyarakat adat dan berkomitmen untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.
4. Menghargai dan mengakui pengetahuan dan sistem penghidupan tradisional.
5. Mengidentifikasi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat yang terdampak yang sesuai secara budaya dan gender dan dapat diaplikasikan pada seluruh generasinya, serta menyusun langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, dan/atau memitigasi dampak negatifnya pada Masyarakat Adat.
6. Melakukan konsultasi yang bermakna dengan komunitas Masyarakat Adat yang terdampak dan organisasi Masyarakat adat yang terkait untuk mengajak peran serta mereka (i) dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencegah timbulnya dampak negatif, atau jika tidak mungkin dihindari, untuk meminimalkan, memitigasi, atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut.
7. Mengawasi penerapan IPP dengan menggunakan tenaga para ahli yang berkualifikasi dan berpengalaman; mengadopsi pendekatan pengawasan partisipatoris jika memungkinkan; dan mengukur apakah tujuan IPP dan

hasil yang diinginkan telah tercapai dengan mempertimbangkan kondisi dasar yang ada dan hasil pengawasan IPP. Melaporkan hasil pengawasan.

3.6 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Badan Akreditasi (AE) bertanggung jawab atas pengawalan dan pengawasan Green Guarantee Company (GGC) dan memastikan bahwa ia memenuhi prinsip-prinsip gadai dan standar GCF, standar perlindungan lingkungan dan sosial serta Kebijakan Gender, Kebijakan Masyarakat Adat serta kebijakan dan persyaratan GCF relevan lainnya, sesuai dengan kesepakatan hukum yang relevan (perjanjian akreditasi induk dan perjanjian kegiatan yang didanai).

AE akan membantu dalam meninjau dan menyerahkan laporan Dampak Iklim per caturwulan dan tahunan serta rencana Pengawasan dan Evaluasi agregat/terkonsolidasi kepada GCF. Saat GGC mulai beroperasi, AE juga akan membantu memastikan bahwa GGC memiliki sistem, kebijakan, dan prosedur institusional yang dapat diterapkan agar untuk melaksanakan program-program secara memadai. Selain itu, AE akan terus melakukan pengawasan berkesinambungan bahwa GGC dapat mengawasi, melaporkan, dan memverifikasi data dan bahwa standar, langkah pengamanan, dan kebijakan GCF yang relevan sedang ditegakkan. Dalam Lampiran 11, anggaran telah dialokasikan untuk fungsi pengawasan, evaluasi, dan pelaporan indikator-indikator IP dan dampaknya dimana AE dapat mengawasi baik anggaran maupun penggunaan dana dalam mencapai pelaksanaan aktivitas. Sampai saat ini, AE telah melakukan uji kelayakan dan penilaian risiko yang kuat pada GGC untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh akan diadministrasikan sepenuhnya untuk pelaksanaan program.

Memang, AE dan penilai dari pihak ketiga yang ditunjuk, tim spesialis Iklim, Gender, dan E&S telah mengukur kemampuan GGC untuk mengimplementasikan dan melestarikan Kebijakan Gender GCF serta memastikan komitmen mereka untuk sepenuhnya mematuhi semua protokol GCF. AE akan selalu bersikap tangkas dan cekatan dalam lingkungan kebijakan GCF yang terus berkembang serta memastikan bahwa GCF akan selalu mengikuti perkembangan atau perubahan yang mungkin timbul selama implementasi program.

GGC sebagai Lembaga Pelaksana (EE) akan diawasi oleh AE. Oleh karena itu, GGC bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menjalankan program-program yang dibiayai-GCF dan akan meninjau kembali rencana kerja, penilaian, dan laporan Dampak Iklim yang diserahkan oleh pihak Peminjam. EE juga memiliki pengetahuan dan keahlian institusional untuk mengimplementasikan persyaratan evaluasi pengawasan dan pelaporan karena berkaitan dengan indikator spesifik gender berdasarkan riwayat mereka sebelumnya dalam mengeluarkan surat obligasi hijau.

4 Aplikasi Kerangka Kerja

4.1 PROSES SELEKSI TRANSAKSI GGC (TSP)

Dalam usaha untuk mencapai misinya, GGC akan mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang lebih luas dari transaksi yang ingin diberikan jaminan kredit. Pertimbangan spesifik akan diberikan untuk memahami, mengukur, dan mengelola dampak transaksi berdasarkan empat elemen inti berikut:



Tujuan

Dampak positif **perubahan iklim** yang dirasakan oleh Peminjam, yang tidak berkaitan dengan transaksi, seperti: dapat ditiru, menetapkan preseden atau mengatasi informasi asimetris sehingga tercipta suatu jalur untuk pembiayaan iklim yang lebih besar dari pasar modal global.



Orang

Dampak positif dan negatif yang dirasakan peminjam terhadap pemangku kepentingan yang penting. Ini meliputi karyawan, keluarga, pelanggan, pemasok, komunitas, dan individu lain yang mempengaruhi atau terdampak oleh peminjam.



Planet

Dampak positif dan negatif dari pihak peminjam terhadap lingkungan alam sekitarnya. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam, bahan berbahaya, dan sebagainya, serta pembuangan limbah, penanaman hutan kembali, dan restorasi alam yang telah rusak.



Keuntungan

Dampak positif dan negatif Peminjam terhadap ekonomi lokal, nasional, dan internasional. Di antara lain menciptakan lapangan kerja, menghasilkan inovasi baru, membayar pajak, menciptakan kekayaan, dan dampak ekonomi lain yang dimiliki oleh Peminjam.

Gambar 2 Proses Transaksi

Dalam konteks di atas, GGC mengakui peran penting dalam memastikan **keseharian lingkungan dan sosial (E&S) yang sehat** untuk menghindari dan/atau meminimalkan potensi liabilitas finansial dan reputasi. Oleh sebab itu, pertimbangan faktor-faktor E&S dan langkah-langkah pengamanan membentuk bagian penting dari Kartu Skor Transaksi GGC yang digunakan untuk memilih transaksi-transaksi yang memastikan risikodan dampak **E&S** utama telah diidentifikasi dan dikelola secara efektif selama siklus transaksi berlangsung.

Pengembangan suatu proyek yang layak dibiayai merupakan sebuah proses yang panjang, terutama jika aset infrastruktur atau intervensinya cukup besar. Sebagai penjamin, diperkirakan bahwa GGC baru akan dikenalkan di sebuah transaksi pada tahap akhir dari pengembangan proyek, umumnya untuk membantu agar proyek tersebut kesepakatan keuangan dengan memberikan jaminan kredit pada pemberi modal kredit yang lebih senior. Diagram di bawah ini mengilustrasikan kondisi tersebut, dengan menunjukkan bahwa ‘Penjamin’ baru berperan dalam fase ‘Implementasi’ dan ‘Operasi’ siklus pelaksanaan proyek.



Gambar 3 Alur Proses

Oleh karena itu, GGC kemungkinan tidak akan memiliki peluang untuk mempengaruhi **penilaian E&S**, dari suatu proyek iklim di tahap awal siklus pengembangan proyek. Sebaliknya, GGC cenderung mengandalkan **Proses Seleksi Transaksi (TSP) yang sehat**, yang akan meninjau dan melaksanakan **uji kelayakan strategis** pada dokumentasi, proses, dan sistem **E&S** yang dimiliki oleh Peminjam untuk menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan **Kerangka Kerja Pengelolaan E&S** GGC. Dengan latar belakang inilah, TSP GGC yang kuat berhasil dikembangkan dan mencakup tujuh (7) tahap-tahap strategis yang akan diikuti oleh GGC dalam menentukan apakah suatu proyek memenuhi **standar E&S** yang diprasyaratkan. Selain itu, TSP merupakan suatu **proses unik untuk** berupaya memberi informasi tentang pemilihan proyek iklim yang berdampak tanpa keterlibatan GGC sebagai pengembang proyek ataupun sponsor. Berikut ini adalah ilustrasi sederhana tentang TSP, dan setiap tahapannya akan dideskripsikan setelahnya.



Gambar 4 Proses Transaksi

4.1.1 Tahap 1: Originasi Transaksi (1-2 minggu)

Transisi akan ditelusuri oleh Mitra Originasi GGC (misalnya, MUFG, Deutsche Bank, dsb) yang akan memperoleh pelatihan dari GGC mengenai **Kerangka Kerja Pengelolaan E&S** dan seperti apa transaksi proyek yang dapat diterima dari sudut pandang **E&S**. Penerapan **Standar Performa IFC** oleh GGC sebagai landasan untuk **Kerangka Kerja Pengelolaan E&S** mereka akan sangat membantu karena telah tersebar luas di pasar modal dan kredit dunia, sehingga mendapat manfaat dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada standar yang dibuat khusus.

Pada Transaksi Asal, Mitra Asal GGC berhubungan dengan peminjam transaksi proyek untuk mengumpulkan informasi dan dokumen terbaru untuk transaksi proyek. Melihat GGC kemungkinan akan berinteraksi di dekat akhir siklus pengembangan proyek, diharapkan, setidaknya, dokumen-dokumen berikut akan tersedia untuk ditinjau lebih lanjut oleh spesialis dan komite yang diperlukan GGC, *antara lain*:

- i. Analisis Dampak Iklim (mitigasi) dan/atau Penilaian Dampak Iklim (adaptasi);
- ii. Kebijakan Tentang Gender & Rencana Kerja;
- iii. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA); dan
- iv. Sertifikasi Obligasi Iklim dan/atau Pinjaman.

Mitra organisasi dengan bantuan dari pemilik proyek akan bertanggung jawab dalam **mengidentifikasi** kelompok masyarakat adat yang terdampak di area proyek. *Di beberapa negara, kelompok-kelompok ini disebut masyarakat adat. Di negara-negara lainnya, mungkin memiliki istilah lainnya, seperti “penduduk pribumi dan komunitas lokal”, “komunitas lokal”, “komunitas lokal tradisional Afrika sub-Sahara yang secara historis kurang terlayani”, “minoritas etnik adat”, “komunitas Afro-keturunan di Amerika Selatan dan Karibia”, “grup etnis”, “Aboriginals”, “suku pegunungan”, “kelompok yang rentan dan terpinggirkan”, “warga negara minoritas”, “suku terjadwal”, “bangsa pertama”, “kelompok suku”, “penggembala”, “pemburu-peramu”, “kaum nomad” atau “penghuni hutan”. Apa pun terminologi yang digunakan, persyaratan dalam Kerangka Kerja ini dapat diaplikasikan pada semua kelompok tersebut. Jika hal ini diidentifikasi sebagai suatu dampak yang potensial, penyaringan awal akan dilaksanakan.*

4.1.2 Tahap 2: Seleksi Awal & Pengelompokkan (1-3 minggu)

Setelah Mitra Originasi melakukan satu transaksi, ia selanjutnya akan menjalani tahap penyaringan awal menggunakan Daftar Periksa Merah, Kuning, Hijau (“RAG”). Daftar Periksa RAG ini merupakan bagian dari Kartu **Skor Transaksi** yang unik dan beragam dan merupakan aset seleksi proyek yang telah dipatenkan oleh GGC. Dari sudut pandang **E&S**, tahap penyaringan RAG ini akan membutuhkan GGC untuk menetapkan jawaban untuk beberapa pertanyaan berikut ini:

Tabel 1 Daftar Periksa RAG

DAFTAR PERIKSA RAG	Merah	KUNING/AMBER	Hijau
Apakah peminjam/proyek yang diusulkan memicu aktivitas yang dicekualikan/dilarang dalam daftar Pengecualian GGC?	YA	MUNGKIN	TIDAK
Apakah peminjam/proyek menghadapi kontroversi (yaitu peristiwa Lingkungan atau Sosial seperti pemogokan tenaga kerja, denda dan hukuman untuk ketidakpatuhan, pencemaran lingkungan, kekerasan berbasis gender/pelecehan seksual, dll.) selama 3 tahun terakhir?	YA	MUNGKIN	TIDAK
Apakah pihak peminjam/proyek akan menimbulkan dampak lingkungan negatif yang bermakna?	YA	MUNGKIN	TIDAK
Jika ada komunitas sosio-kultural yang tinggal atau memanfaatkan lahan proyek yang dapat dianggap sebagai suatu “suku” (suku pegunungan, suku terjadwal, orang suku), “minoritas” (minoritas etnis atau nasional), atau “komunitas pribumi” yang terdampak oleh proyek tersebut, apakah pernah dilakukan konsultasi yang bermakna bersama kelompok-kelompok tersebut dan jika perlu, apakah mereka pernah diberi dan menandatangani persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan?	TIDAK	MUNGKIN	YA
Apakah proyek memiliki Kebijakan Lingkungan & Sosial, Penilaian Dampak Lingkungan & Sosial dan Sistem Manajemen Lingkungan & Sosial?	TIDAK	MUNGKIN	YA
Akankah salah satu dari kegiatan proyek menimbulkan pemukiman kembali masyarakat adat secara tidak sukarela?	YA	MUNGKIN	TIDAK
Akankah salah satu dari kegiatan proyek menimbulkan kontak yang tidak dikehendaki dengan kelompok terpencil yang memiliki kontak eksternal terbatas, dan juga dikenal sebagai	YA	MUNGKIN	TIDAK

masyarakat “dalam isolasi sukarela”, “masyarakat terisolasi”, atau “dalam kontak awal”?			
---	--	--	--

Jika jawaban untuk salah satu dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah **MERAH** maka transaksi akan ditolak dan tidak akan diusulkan lagi oleh GGC. Untuk menghindari keraguan, semua proyek **GCF** dalam **Kategori A** tidak diperhitungkan dalam mandat GGC dan tidak akan dipertimbangkan lebih jauh.

Jika terdapat kekurangan informasi untuk menarik suatu kesimpulan yang jelas dan/atau ada faktor-faktor mitigasi (seperti, pihak peminjam melakukan usaha yang kredibel untuk keluar dari kategori MERAH), maka transaksi digolongkan sebagai **KUNING/AMBER** dan dirujuk ke Komite Eksekutif GGC. Komite akan menentukan apakah sumber daya lebih lanjut untuk uji kelayakan perlu dikerahkan untuk membantu pihak peminjam agar bisa beralih ke kategori HIJAU.

Jika skor transaksi menghasilkan jawaban **HIJAU** untuk semua pertanyaan dalam Daftar Periksa RAG, maka transaksi tersebut akan dilanjutkan ke tahap proses seleksi transaksi, dari sudut pandang **E&S**.

4.1.3 Tahap 3: Peninjauan Kembali dan Pengajuan Keberatan (1-3 minggu)

Setelah ulasan profesional tentang informasi dan dokumentasi **E&S** tersedia, bersama dengan diskusi dengan tim manajemen senior dari pihak peminjam, maka tim investasi GGC akan mengisi komponen **E&S** dalam Kartu Skor Transaksi dibawah arahan dari spesialis **E&S** internal GGC. Catatan penyeleksian digunakan untuk meringkas hasil analisis dan asumsi yang mendasari masukan-masukan mereka ke dalam Kartu Skor Transaksi.

Draf Kartu Skor Transaksi kemudian diserahkan untuk peninjauan ulang kepada Komite Dampak GGC yang terdiri dari spesialis-spesialis, seperti spesialis **E&S** independen. Para ahli ini akan mempertanyakan kembali semua analisis dan asumsi yang dibuat oleh tim investasi GGC untuk memastikan ada ketelitian yang memadai dalam pelaksanaan metode-metode penilaian, kalkulasi, dan hasil yang diperoleh, termasuk konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat, serta penandatanganan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.

Setelah puas, Komite Dampak GGC akan menyetujui transaksi untuk dilanjutkan ke tahap uji kelayakan formal dan fase strategi remediasi.

4.1.4 Tahap 4: Uji Kelayakan (2-5 minggu)

Tahap uji kelayakan dimulai dengan GGC melibatkankonsultan **E&S** independen di negara bersangkutan untuk melakukan kunjungan lapangan bersama tim investasi GGC dan pihak peminjam. Sejalan dengan kunjungan fisik ke lapangan, mereka akan melakukan serangkaian wawancara secara kolektif dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan apakah informasi **E&S** yang diajukan akurat dan sesuai dengan aspirasi dan pernyataan-pernyataan yang diuraikan dalam dokumen. Para spesialis E&S juga akan memastikan bahwa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan diberikan oleh pihak-pihak yang relevan¹.

_____#

#

¹Jika aktivitas-aktivitas yang diusulkan sebagai jaminan GGC memanfaatkan warisan budaya masyarakat adat untuk tujuan komersial, pemilik proyek harus memberitahukan masyarakat adat yang terdampak menggunakan bahasa lokal yang mereka pahami; mengenai ruang lingkup dan sifat pengembangan komersialtersebut serta berbagai konsekuensi

#

Para spesialis E&S juga akan memastikan bahwa mereka akan mempertimbangkan hukum dan peraturan perundangan-undangan, serta kewajiban-kewajiban dari berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional yang relevan.

Tim yang lebih besar juga akan berusaha membangun kepercayaan dalam komitmen dan kompetensi peminjam untuk melaksanakan **Rencana Pengelolaan E&S**-nya.

GGC mengakui bahwa seleksi dari dan hubungan yang terbangun dengan konsultan ahli **E&S** dalam negeri merupakan elemen penting dalam **proses penjaminan internal** GGC. Konsultan spesialis **E&S** dalam negeri juga akan membantu GGC dalam melakukan pengawasan dan evaluasi ad-hoc (M&E) proyek transaksi yang terpilih, pasca penutupan pembiayaan, serta bekerja sama dengan peminjam untuk meningkatkan kompetensi **Pengelolaan E&S** mereka.

Hasil dari tahap uji kelayakan ini adalah pembaharuan Kartu Skor Transaksi dan rincian transaksi laporan DD dari tim investasi, didukung oleh konsultan ahli **E&S** dalam negeri. Laporan tersebut memberikan bukti-bukti untuk memvalidasi berbagai pemeriksaan transaksi, analisis, dan asumsi-asumsi dasar yang sudah dibuat. Yang terpenting, laporan tersebut juga mendeskripsikan setiap celah dan/atau penyimpanan bermakna yang ditemukan selama tahap uji kelayakan, yang perlu ditangani oleh pihak peminjam.

Tabel 2 Contoh Daftar Periksa Untuk Uji Kelayakan

Pertanyaan utama	Tanggapan	Komentar
Silakan baca ruang lingkup penerapan Kebijakan Masyarakat Adat GCF ² . Apakah ada kelompok sosial-budaya yang ada di atau menggunakan area proyek yang termasuk dalam lingkup penerapannya?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Apakah ada hukum atau kebijakan lokal atau nasional, serta penelitian/penyelidikan antropologi yang mengakui kelompok ini hadir di dan memanfaatkan area proyek sebagai warisan “minoritas etnik”, suku terjadwal, masyarakat suku, minoritas nasional, atau komunitas budaya?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Apakah negara tersebut turut menandatangani Konvensi ILO No. 169 dan/atau mengakui secara formal hak masyarakat adat tersebut dalam peraturanperundang-undangannya ?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Apakah perusahaan lain yang beroperasi di lahan pribumi di negara atau daerah tersebut pernah ada konflik dengan?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Apakah konsultasi awal, yang dilakukan bersama masyarakat adat, mengindikasikan potensi konflik antara proyek dengan masyarakat adat, termasuk aspirasi mereka terhadap pengembangan yang dilakukan?	Ya Tidak	
Apakah analisis kerangka kerja institusional dan hukum yang ada memiliki celah hukum, terutama yang berkaitan dengan lahan dan hak sumber daya, serta pemenuhan syarat Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Apakah proses penilaian dampak, termasuk metodologi dan hasil temuannya, telah didokumentasikan dan dikomunikasikan secara memadai?	Ya Tidak Tidak Diketahui	

_____#

#

potensial dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Pemilik proyek harus dapat menjamin bahwa masyarakat adat memiliki akses yang adil terhadap berbagai manfaat yang diperoleh dari pengembangan tersebut, yang sesuai dengan budaya dan tradisi wilayah dan masyarakatnya. #

#SSORSA V V (FQDDBEL @DQETMC&CNBTL DMSHCHFDMNTR²ODNOIKR²ONRFX#

Apakah telah dilakukan proses konsultasi bermakna dengan semua perwakilan dari institusi masyarakat adat di sekitar area proyek yang luas?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Jika perlu, apakah persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan telah ditandatangani dan diserahkan?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Apakah proyek ini menimbulkan pemindahan, relokasi, atau transmigrasi/pemindahan orang?	Ya Tidak Tidak Diketahui	
Apakah aktivitas proyek yang mencakup perkembangan komersial sumber daya alam (seperti, mineral, hidrokarbon, hutan, air, lahan perburuan atau memancing), yang terletak di dalam tanah adat yang kurang dimanfaatkan akan berdampak pada mata pencaharian atau penggunaan budaya, upacara adat, dan spiritual yang mendefinisikan identitas dan komunitas Masyarakat Adat?	Ya Tidak Tidak Diketahui	

4.1.5 Tahap 5: Remediasi & Pemaparan (2-5 minggu)

Tahap remediasi dan pemaparan sejalan dengan tahap uji kelayakan, ditarik langsung dari rincian laporan transaksi DD. Jika terdapat celah dan/atau penyimpangan, tim investasi GGC, di bawah arahan para spesialis **E&S** internal GGC, akan bekerja sama dengan konsultan spesialis **E&S** dalam negeri untuk membantu pihak peminjam merencanakan strategi remediasi untuk mengatasi celah/penyimpangan tersebut.

Setelah **strategi remediasi** sudah dikembangkan, pihak peminjam wajib berkomitmen untuk melaksanakan strategi dan rencana kerjanya, dalam periode waktu yang telah disepakati. Jika pihak peminjam tidak berkomitmen atau menyatakan penolakan untuk membuat dan/atau melaksanakan strategi remediasi, maka transaksinya akan ditolak oleh tim investasi GGC.

Untuk mengalami kemajuan, strategi remediasi dan pelaksanaannya harus diterapkan sesuai dengan standar para spesialis **E&S** internal GGC, di samping komitmen teguh dari pihak peminjam untuk menjalankan strategi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji kelayakan dan terutama jika ada celah atau kelemahan yang teridentifikasi, **GGC akan memastikan** langkah-langkah penghindaran atau mitigasi berbagai risiko, kesempatan, dan dampak yang teridentifikasi, disertai tindakan korektif untuk mengatasinya, termasuk semua kondisi yang mengikat (CP). **Semua hal yang berlaku untuk masyarakat adat dan wilayah adat³ akan dianggap berperan vital dalam IPP.** Rencana tersebut akan merinci informasi dasar yang dibutuhkan oleh pemilik proyek untuk membuktikan pemahaman dan berbagai dampak dari aktivitas yang mereka usulkan.

Rencana Masyarakat Adat harus mempertimbangkan beberapa elemen berikut ini:

_____#
#

³Di mana aktivitas yang diusulkan untuk dijamin oleh GGC membutuhkan pengakuan hukum untuk hak atas tanah dan wilayah, maka pemilik proyek yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat adat yang terdampak, akan mempersiapkan sebuah rencana agar memperoleh kepastian dan pengakuan hukum atas hak kepemilikan tersebut sesuai dengan hukum dan kewajiban yang berlaku di negaranya. GGC juga tidak akan menjamin aktivitas-aktivitas yang akan merelokasi masyarakat adat secara paksa, kecuali sesuai dengan yang dideskripsikan dalam kebijakan GCF. #

1. Informasi dasar (dari ahli, proses lingkungan yang independen dan partisipatoris serta proses penilaian risikodan dampak sosial)
2. Temuan utamadan analisis dampak, risiko, dan peluang
3. Langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, dan memitigasi dampak-dampak negatif serta mendorong dampak dan peluang positif.
4. Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan
5. Pengelolaan sumber daya alam berbasis-komunitas dan mekanisme ganti rugi.
6. Hasil dari konsultasi (selama proses pengukuran risikodan dampak lingkungan dan sosial), termasuk daftar individu dan organisasi yang sudah berpartisipasi, jadwal, penanggung jawab untuk setiap aktivitas, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan rencana tindak lanjut;
7. Keterkaitan dengan evaluasi gender dan rencana kerja (Lampiran 8)
8. Distribusi manfaat dan pengaturan kepemilikan lahan
9. Biaya, anggaran, jadwal, dan tanggung jawab organisasi
10. Dokumentasi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, jika diperlukan

Strategi dan rencana kerja kemudian akan diajukan bersama dengan Kartu Skor Transaksi terbaru, rincian laporan transaksi DD, dan strategi M&E (lihat Tahap 6), sebagai bahan pertimbangan Komite Dampak GGC.

Salah satu versi laporan (yang sesuai dengan persyaratan pengungkapan GCF) akan dipaparkan di situs GGC dan akan dikirimkan ke GCF dengan periodepeninjauan 30 hari (hari kalender). Kebijakan IP menyatakan bahwa semua lembaga terakreditasi dan pihak pelaksana menjamin bahwa semua informasi yang diuraikan akan diberikan sesuai secara budaya dan sosial, termasuk dalam bahasa daerah yang relevan bagi masyarakat dan penasihatresmi mereka, serta menjamin bahwa masyarakat adat akan diberi waktu yang cukup untuk meninjau kembali dan mempertimbangkan informasi yang telah disampaikan. Periode peninjauan ulang setelah memperoleh konfirmasi dari GCF bahwa laporan tersebut telah diajukan ke Dewannya. Semua tanggapan terkait proses pemaparan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuatan strategi remediasi.

4.1.6 Tahap 6: Strategi Pengawasan dan Evaluasi (2-5 minggu)

Tahap Strategi Pengawasan & Evaluasi (M&E) dilakukan sejalan dengan tahapan remediasi Strategi M&E dikembangkan oleh tim investasi GGC bersama dengan konsultan ahli dalam negeri GGC dan pihak peminjam. Strategi M&E berhubungan langsung dengan Teori Perubahan GGC, yang telah disetujui oleh GCF. Setiap aktivitas, keluaran, hasil dan tujuan akhir, diuraikan secara rinci dalam strategi M&E dengan aksi yang jelas tentang bagaimana, dan oleh siapa, data dan informasi tersebut dikumpulkan, diperiksa dan dilaporkan, yang berkenaan dengan elemen **Manajemen E&S** transaksi.

Strategi M&E harus mendapat komitmen yang jelas dari peminjam, sebelum diajukan bersama dengan Kartu Skor Transaksi, laporan DD transaksi yang terperinci, dan strategi remediasi, untuk pertimbangan Komite Dampak GGC. Seperti halnya strategi remediasi, di mana peminjam tidak berkomitmen atau menyatakan penolakan yang jelas untuk

mengembangkan dan/atau menyampaikan Strategi M&E, transaksi tersebut akan ditolak oleh tim investasi GGC sebelum diajukan kepada Komite Dampak GGC untuk dipertimbangkan

4.1.7 Tahap 7: Persetujuan (1-2 minggu)

Komite Dampak GGC, yang terdiri dari spesialis independen, akan meninjau Kartu Skor Transaksi yang sudah diperbarui, laporan DD transaksi terperinci, strategi remediasi, dan Strategi M&E yang sudah disediakan oleh tim investasi GGC. Setelah yakin bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan **Kerangka Manajemen E&S** GGC, Komite Dampak akan diminta untuk memberikan persetujuannya agar transaksi dapat berlanjut ke penentuan penerbitan jaminan.

Namun, jika Komite Dampak GGC memiliki kekhawatiran yang tersisa terkait dengan **Manajemen E&S**, termasuk IPPF, elemen-elemen dari transaksi, maka tim investasi GGC akan diminta untuk kembali ke Tahap 5 (Remediasi & Pengungkapan) dan bekerja erat dengan peminjam untuk mengatasi masalah Komite Dampak GGC.

Setelah Komite Dampak GGC menyetujui transaksi, transaksi tersebut akan berlanjut ke Komite Investasi GGC yang akan berpendapat mengenai aspek material, keuangan, dan komersial dari transaksi tersebut. Penting bahwa Komite Investasi hanya akan menyetujui transaksi yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Komite Dampak. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi potensial memiliki **tujuan** iklim yang jelas dan memprioritaskan **orang** dan **planet sebelum keuntungan menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, persetujuan dari elemen transaksi 'tujuan, orang, dan planet' merupakan prasyarat untuk keuntungan.**

Jika Komite Investasi GGC merasa nyaman dengan aspek finansial dan komersil transaksi tersebut, ia akan menerbitkan sebuah persetujuan formal untuk memberikan jaminan atas nama peminjam.

dari **para pemilik proyek / pengembang / sponsor** tentang kemajuan yang dibuat untuk memenuhi kelemahan dan kesenjangan yang telah teridentifikasi.

4.1.8 Garis Pertahanan Multidisiplin

Oleh karena itu, GGC memanfaatkan 'garis pertahanan' multidisiplin pada TSP di atas untuk mengurangi kemungkinan transaksi yang dipilihnya untuk dijamin terkena risiko **E&S**. Garis pertahanan ini terdiridari spesialis profesional di bidang iklim, jenis kelamin, ilmu lingkungan dan sosial, dan sertifikasi obligasi iklim. Penting bahwa GGC akan bekerja sama dengan GCF dalam penunjukan spesialis-spesialis tersebut. Dalam hal elemen **Manajemen E&S**, garis pertahanan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Spesialis

Spesialis Internal E&S	Spesialis E&S internal diharapkan merupakan karyawan tingkat menengah hingga senior dengan pengalaman kerja setidaknya 10 tahun di bidang E&S dengan fokus pada pasar berkembang.
Spesialis Komite Dampak E&S	Spesialis E&S Komite Dampak diharapkan merupakan karyawan tingkat senior dengan pengalaman kerja setidaknya 15 tahun di bidang E&S dengan fokus pada pasar berkembang.

Konsultan E&S Dalam Negeri	Konsultan E&S dalam ⁴ negeri diharapkan merupakan perusahaan konsultan E&S lokal atau regional terkemuka yang memiliki rekam jejak yang kredibel dengan pengalaman setidaknya 5 tahun bekerja dengan dan menerapkan Standar Kinerja IFC.
---------------------------------------	---

Selain hal di atas, semua anggota tim investasi GGC juga akan diberikan pelatihan **Manajemen E&S** secara rutin untuk memastikan bahwa ada pemahaman yang kuat mengenai persyaratan **Kerangka Manajemen E&S** GGC. Anggota tim juga akan diajarkan keterampilan tentang cara menentukan kompetensi utama seorang peminjam untuk dapat memenuhi prasyarat-prasyarat multidisiplin ini.

4.1.9 Proyeksi Kerangka Watu TSP

Diperkirakan, berdasarkan pengalaman tim yang diperoleh dari inisiatif dan organisasi penjamin global yang serupa (misalnya GuarantCo), bahwa Proses Seleksi Transaksi akan memakan waktu antara 12 - 24 minggu (atau 3 - 6 bulan). Ilustrasi kerangka waktu di bawah ini menunjukkan bahwa 'kerangka waktu yang efisien' dapat membutuhkan waktu 12 minggu, di mana 'kerangka waktu yang tertunda-tunda' dapat membutuhkan waktu (dan berpotensi lebih lama dari) 24 minggu.

4.2 PASCA-PENERBITAN DARI OBLIGASI ATAU PINJAMAN IKLIM HIJAU

Setelah obligasi atau pinjaman diterbitkan, GGC akan menerapkan langkah-langkah penanganan risiko berkelanjutan untuk memastikan bahwa Kerangka tersebut diterapkan secara konsisten dengan melaksanakan tugas-tugas berikut:

- A. Pemilik proyek harus menjamin bahwa tindakan perbaikan yang telah diatur dalam ESAP akan ditangani.
- B. GGC akan mewajibkan **para pemilik proyek / pengembang / sponsor** untuk memantau dan mengawasi aktivitas dan kepatuhan terhadap Kerangka Kerja. Contoh yang mungkin dari daftar periksa yang dapat digunakan selama proses ini dicatat di bawah ini:

Tabel 4 Daftar periksa untuk pemantauan dan evaluasi

Pertanyaan utama	Tanggapan	Komentar
Apakah tindakan E&S dan rencana IPP sedang dilaksanakan?	Ya Tidak	
Apakah strategi pemantauan partisipatoris telah diterapkan untuk melacak kinerja dalam melawan risiko utama atau dampak potensial yang teridentifikasi?	Ya Tidak	
Apakah mekanisme pengaduan tingkat proyek telah dikembangkan dan disepakati dengan masyarakat pribumi/komunitas yang terkait dan/atau pakar eksternal? Apakah informasi ini telah disebarluaskan kepada pemegang hak terkait?	Ya Tidak	
Apakah pernah menerima keluhan dan apa hasil/penyelesaiannya?	Ya	

_____#

#

⁴# Paling sedikit, firma konsultansi E&S dalam negeri akan diminta untuk menunjukkan keahlian dan pengalaman ilmu sosial mereka dengan masyarakat di dalam negara tersebut.#

	Tidak	
Apakah strategi komunikasi yang transparan telah dikembangkan dan disepakati dengan masyarakat pribumi/ komunitas yang terkait, termasuk pengertian mengenai saluran komunikasi yang memadai?	Ya Tidak	

- C. Pemilik proyek akan memantau, meninjau, dan melaporkan fungsi yang terkait dengan kinerja dari kegiatan dan memastikan bahwa mereka konsisten dengan Kerangka Kerja dengan cara melaporkan dampak dan hasil kegiatan mereka dalam laporan dampak yang diperlukan.
- D. GGC akan memerlukan pembaruan proyek jika ada ekspansi operasional atau proyek, perubahan, atau jika memerlukan adaptasi sehingga membutuhkan proses uji tuntas baru untuk diselesaikan yang akan menentukan apakah tindakan tambahan harus dipertimbangkan untuk memastikan keselarasan dengan Kerangka Kerja.
- E. Jika tindakan perbaikan diperlukan terkait dengan masalah/keluhan yang tercatat dalam mekanisme ganti rugi maka tindakan perbaikan harus diterapkan dengan segera dan dengan hormat.
- F. Anggaran yang cukup akan dialokasikan untuk merumuskan dokumen-dokumen di atas dan melakukan prosedur yang diperlukan oleh pemilik proyek.
- G. Terakhir, GGC akan menyerahkan dokumen yang relevan untuk diungkapkan di situs web GCF yang mencakup dokumen E&S dan laporan perlindungan Masyarakat Pribumi.

5 Mekanisme Ganti Rugi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

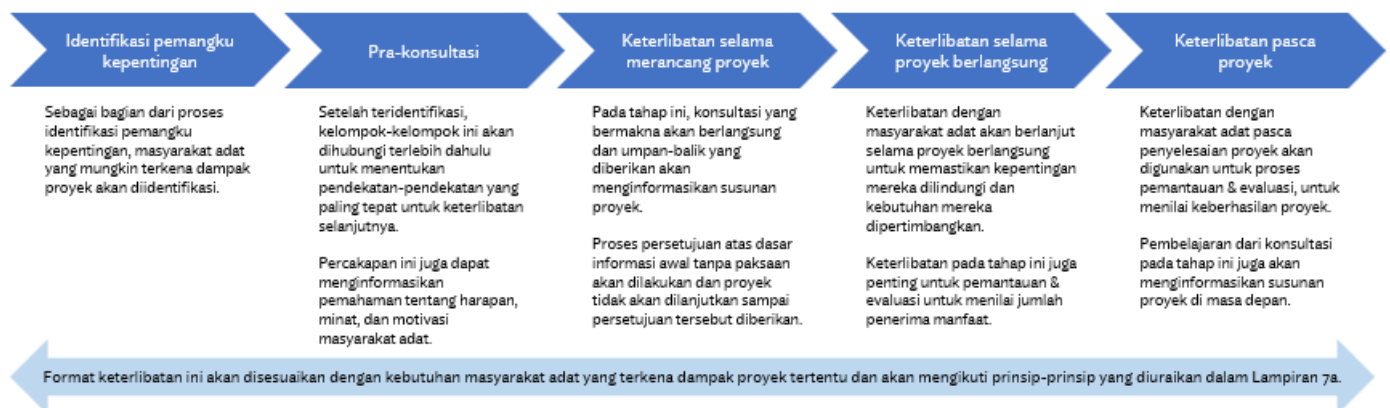
5.1 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pilar Standar Risiko dan Persyaratan E&S untuk memfasilitasi integrasi dari manajemen risiko E&S ke dalam siklus hidup pembiayaan dan pengambilan keputusan GGC. Dalam konteks ini, keterlibatan pemangku kepentingan menunjukkan dialog berkelanjutan yang proaktif, pembagian informasi, dan interaksi antara GGC dan pemangku kepentingannya (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6). Oleh karena itu, GGC berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan yang efektif (internal dan eksternal dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7) untuk mendukung budaya transparansi dan akuntabilitas serta pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Sebagai contoh, menerapkan interaksi lintas tim secara rutin, menjalankan rapat dan presentasi mengenai topik E&S, komunikasi E&S internal secara langsung melalui e-mail, buletin, dll.

Pemilik proyek dengan demikian akan diminta untuk merancang proses keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat menjamin:

- kekhawatiran pemangku kepentingan ditampung dan potensi risiko diidentifikasi secara memadai;
- kelompok dan orang-orang yang hidupnya dapat terdampak oleh proyek dikonsultasikan dengan baik untuk memverifikasi dan
- mengevaluasi signifikansi dari tiap dampak;
- kelompok dan masyarakat yang terkena dampak berpartisipasi dalam pengembangan langkah-langkah mitigasi, kebimbangan
- membuat mengenai pengoperasian mereka, dan memantau implementasi mereka.

Dalam hal waktu, diagram di bawah ini menunjukkan tahap-tahap terjadinya konsultasi yang berarti dengan masyarakat yang terkena dampak:



Proses konsultasi juga akan berjalan sebagai berikut:

1. Komunitas diidentifikasi:

- Komunitas yang relevan akan diidentifikasi seperti yang telah disebutkan dalam kerangka kerja. Konsultasi langsung akan diatur dengan para pemimpin utama dan pembuat keputusan yang hadir, termasuk perempuan, untuk memastikan bahwa konsensus tercapai sebelum keputusan disahkan.
- Seorang juru bahasa akan ditunjuk untuk mengarahkan diskusi agar nuansa bahasa tidak hilang dalam terjemahan.

2. Informasi yang diberikan:

- Pemilik proyek akan memberikan informasi proyek kepada para pemangku kepentingan dalam bahasa lokal mereka. Informasi ini akan mencakup kemungkinan dampak kepada jenis kelamin, E&S, dan Masyarakat Pribumi yang harus mereka ketahui sebelum proyek dilaksanakan.
- Rincian kontak pemilik proyek serta metode untuk kontak lebih lanjut jika ada masalah atau pertanyaan yang muncul selama atau dari pertemuan.

3. Mode konsultasi:

- Pertemuan dapat terdiri dari pertemuan n-orang atau lokakarya (di mana infrastrukturnya tersedia, pertemuan virtual juga akan diatur sebagai upaya terakhir dengan persetujuan dari masyarakat).
- Proyek ini akan mendorong partisipasi laki-laki dan perempuan yang setara dan efektif dalam konsultasi pemangku kepentingan (ini juga mencakup kesesuaian tempat dan waktu konsultasi).
- Perhatian khusus harus diberikan pada fakta bahwa proyek harus mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan memodifikasi desain proyek, jika umpan balik tersebut masih dapat diterima akal.
- Semua proyek akan membentuk mekanisme masukan, tanggapan, dan keluhan formal untuk memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk membagi masukan atau keluhan apa pun sepanjang masa proyek.

4. Catatan yang dibuat selama proses:

- Pemilik proyek akan menggunakan sudut pandang masyarakat pribumi atau komunitas rentan dan menjamin relevansi dari umpan balik yang diterima.
- Proyek akan meninjau komentar yang disampaikan oleh pemangku kepentingan dan melaporkan bagaimana komentar ini telah diperhitungkan dalam proyek. Proses ini dapat juga melibatkan perubahan pada desain proyek, jika sesuai. Pemilik proyek akan memberikan pembenaran ketika pengamatan yang dilakukan belum diperhitungkan dalam proyek atau ditangani.

5. Keputusan

- Beberapa lokakarya akan diadakan jika topik tersebut memerlukan diskusi yang ekstensif sebelum proses dan rencana aksi dapat disusun.

- Keputusan akan didokumentasikan dalam tulisan dan akan tersedia bagi pemimpin masyarakat untuk disetujui sebelum dianggap final.

6. Pelaporan kemajuan:

- Pemilik proyek akan menyimpan informasi yang dikumpulkan dan memberikan rincian penting kepada Entitas Akreditasi selama proses investasi.

Rincian lebih lanjut tentang pelibatan pemangku kepentingan dapat ditemukan di Lampiran 7.

5.2 MEKANISME GANTI RUGI

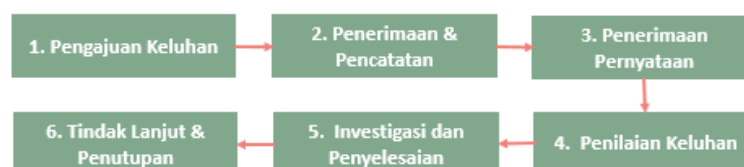
Kebijakan IP mencakup elemen-elemen berikut untuk mekanisme pengaduan:

- Mekanisme tersebut akan dirancang melalui konsultasi dengan masyarakat pribumi yang terkena dampak atau yang berpotensi terkena dampak.
- Mekanisme ini akan memfasilitasi penyelesaian dari pengaduan dengan segera melalui proses yang dapat diakses, adil, transparan dan konstruktif.
- Mekanisme tersebut juga akan sesuai dengan budaya dan mudah diakses, tanpa biaya bagi masyarakat yang terkena dampak, dan tanpa retribusi kepada individu, kelompok, atau komunitas yang mengajukan masalah atau kekhawatiran.
- Jika memungkinkan dan sesuai untuk proyek, mekanisme pengaduan akan memanfaatkan mekanisme pengaduan formal atau informal yang ada dan ditambah dengan pengaturan khusus dari proyek jika diperlukan.
- Mekanisme tersebut tidak akan mengurangi akses ke penyelesaian yudisial atau administratif yang mungkin tersedia melalui sistem negara, dengan mengakui bahwa sistem yang telah dilokalkan ini dapat memberikan informasi yang lebih kuat dan lebih mencerminkan konteks dari masalah di lapangan.
- Mekanisme tersebut juga tidak akan menghalangi akses ke Mekanisme Ganti Rugi independen GCF atau ganti rugi dari entitas pelaksana atau terakreditasi.

Mengenai mekanisme komunikasi eksternal, sebuah mekanisme penting yang harus diterapkan dan dipelihara oleh GGC adalah mekanisme pengaduan. Mekanisme ini akan mendukung GGC untuk secara efektif mengidentifikasi, menerima, mendaftar, menyaring dan mengevaluasi, melacak dan secara formal menangani keluhan atau umpan balik dari pemangku kepentingan mengenai kegiatan GGC. Mekanisme ini akan memfasilitasi penyelesaian dari pengaduan dengan segera melalui proses yang dapat diakses, adil, transparan dan konstruktif. Mekanisme tersebut juga akan sesuai dengan budaya dan mudah diakses, tanpa biaya bagi masyarakat yang terkena dampak, dan tanpa retribusi kepada individu, kelompok, atau komunitas yang mengajukan masalah atau kekhawatiran. Mekanisme pengaduan akan terdiri dari tetapi tidak terbatas elemen-elemen berikut:

- Berbagai cara masyarakat pribumi dapat menyampaikan keluhan mereka, dan dengan mempertimbangkan hambatan/keterbatasan bahasa dan perlunya anonimitas jika pelapor khawatir akan pembalasan atau penundukan oleh perwakilan resmi atau organisasi masyarakat sipil;

- Ketentuan untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama dalam kasus di mana pelapor takut akan pembalasan;
- Penyediaan interpretasi/terjemahan untuk mengatasi hambatan/batasan bahasa;
- Sebuah buku catatan di mana pengaduan terdaftar secara tertulis dan dipelihara sebagai basis data yang tersedia untuk umum. Basis data harus mencakup informasi tentang pengaduan dan penyelesaian pengaduan, termasuk perbaikan yang telah diberikan, dengan mempertimbangkan bahwa identitas pengadu dapat dirahasiakan jika diminta. Basis data ini juga harus dibagikan bersama dengan Mekanisme Ganti Rugi independen GCF;
- Mengiklankan prosedur secara public, mengidentifikasi cara untuk menyampaikan keluhan, menetapkan durasi waktu yang dapat diekspektasikan oleh pengguna sebelum mendapat pengakuan, tanggapan, dan penyelesaian keluhan mereka, deskripsi mengenai transparansi prosedur, dan struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan;
- Proses banding dimana keluhan yang tidak terpuaskan dapat dirujuk ketika penyelesaian keluhan belum tercapai;
- Informasi tentang mekanisme pengaduan lain yang tersedia, termasuk Mekanisme Ganti Rugi independen GCF dan pelaksanaan mekanisme pengaduan entitas yang terakreditasi; dan
- Tindakan telah ditetapkan untuk melindungi pengadu dari pembalasan.
- Mekanisme Pengaduan menyediakan suatu platform bagi setiap individu atau kelompok untuk menyampaikan kekhawatiran, keluhan atau memberikan umpan-balik mengenai GGC dan penerbitnya dan diselesaikan dengan cara yang efektif, transparan dan adil dan secepat mungkin.



Gambar 5 Mekanisme Keterlibatan dan Pengaduan Pemangku Kepentingan

Tanggung jawab untuk membangun dan memelihara mekanisme pengaduan akan berada di tangan pemilik proyek atau sponsor. Pemilik proyek akan bertanggung jawab untuk bertemu dengan penduduk setempat/pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek untuk menjelaskan dan mendiskusikan berbagai mekanisme dan proses pelaporan agar pemangku kepentingan menyepakati metode yang paling tepat. Detail pembahasan akan dicatat dan disertakan dalam ringkasan pertemuan para pemangku kepentingan. Telepon dan alamat email pusat akan disediakan yang akan memfasilitasi pengaduan dan memastikan bahwa pengaduan tersebut dibagikan oleh orang yang tepat yang mengawasi masalah yang dimaksud. Telepon dan email yang diterima akan dirahasiakan. Pemilik proyek akan diharuskan untuk menyimpan catatan yang memuat:

- Tanggal pengaduan
- Nama pihak yang dirugikan dan afiliasi/organisasi apa pun

- Rincian kontak dari pihak yang dirugikan
- Kategori dari keluhan (Lingkungan, sosial, pemerintah, lainnya)
- Jika keluhan merupakan banding dari hasil ganti rugi sebelumnya
- Investigasi yang direkomendasikan untuk permasalahan tersebut
- Tanggal penyelesaian dan informasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan
- Mencatat hasil dari investigasi dalam bentuk dokumen Excel, termasuk juga ringkasan dari aksi yang telah diambil atau alasan untuk tidak diambilnya aksi dan tanggal dari respons kepada pihak yang dirugikan

Pemilik proyek akan menerima keluhan dalam bentuk tulisan dengan tepat waktu dan melaporkan kembali kepada AE untuk tahap berikutnya. Investigasi keluhan mungkin bervariasi bergantung kepada sifat dari keluhan tersebut, tetapi setiap upaya harus dibuat untuk memastikan bahwa keluhan ditangani dengan segera. Sebagian besar investigasi seharusnya tidak lebih dari 90 hari. Isi pengaduan yang didaftarkan dan pengelolaannya harus menghormati kerahasiaan pihak yang dirugikan sejauh mungkin, dan tidak boleh ada pembalasan terhadap pihak yang dirugikan atau pengadu. Dalam beberapa kasus, mungkin tepat bagi pemilik proyek untuk terus melibatkan pihak yang dirugikan selama masa investigasi dari keluhan tersebut. Hal ini bisa terjadi dengan mengundang pihak yang dirugikan untuk bertemu, panggilan telepon bersama, atau secara tertulis. Setiap keterlibatan yang berlangsung dengan pihak yang dirugikan harus dicatat dalam daftar keluhan.